



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA**

2022

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami untuk menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Bab II Bagian Kedua dijelaskan bahwa Penyusunan Rencana Kerja memuat Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan Berpedoman Kepada Renstra Perangkat Daerah.

Dengan demikian diharapkan **Program dan Kegiatan dibidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup** secara bertahap dapat dilakukan dengan lebih baik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Akhirnya kami sangat menyadari dalam penyusunan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaannya.

Kuala Tungkal, Maret 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE
Pembina TK I / IV b
NIP 19680116 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu	6
2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD.....	13
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	24
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	24
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	24
BAB III TUJUAN dan SASARAN	
3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional.....	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	28
BAB IV TABEL RENCANA PROGRAMDAN KEGIATAN TAHUN 2022	30
BABV PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu	7
Tabel 2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD	14
Tabel 2.4. Review terhadap rancangan rencana kerja RKPD.....	24
Tabel 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	24
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup	29
Tabel 4.1. Rencana Program danKegiatan Permendagri No. 90 Tahun 2019.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu tahun) yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan Berpedoman Kepada Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang disusun ini akan mampu memberikan gambaran tentang Rencana Kinerja (RENJA) yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, dalam Pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana kita ketahui bahwa Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup pemanfaatannya harus diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian Lingkungan Hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta dapat memberikan gambaran yang menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dikenal saat ini pada mulanya tahun 2003 disebut Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Kapedalda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 15 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan

tatakerja lembaga teknis daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat status kelembagaannya ditingkatkan menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan saat ini berubah lagi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 06 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tatakerja lembaga teknis daerah dan Perbub No. 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 13 ayat (2) “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi :Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan” pasal 71 ayat (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota `menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. peraturan presiden No.30 Tahun 2020 tentang menetapkan standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya : Honorium perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan diluar kantor pengadaan kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia No 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 3838)

5. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 3853)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4161) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 Tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4585)
9. Peraturan pemerintah No 6 tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi penyelenggraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4815)
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor19 Tahun 2004 Tentang pedoman pengaduan kasus pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang petunjuk Teknis Standar pelayanan minimal Badan Lingkungan Hidup Daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.
12. Keputusan Mentri Negara Lingkungan Hidup No 115 Tahun 2003 Tentang pedoman penentuan status Mutu Air.
13. Peraturan Mentri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
14. Peraturan menteri dalam negeri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi ,kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 47).
17. Keputusan menteri No.050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja 2022 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan selama 1 (satu) Tahun pada Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki tolak ukur dan alat bantu bagi unit – unit kerja yang ada sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya dan tersusunnya Dokumen perencanaan dibidang Lingkungan Hidup yang mampu memberikan rumusan strategi, arahkebijakan, program yang lebih terarah, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mampu menopang pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Dinas Lingkungan Hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan 2022 atau sumber dana lainnya.
3. Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup secara baik dan seimbang. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam serta terwujudnya penataan hukum dibidang Lingkungan hidup yang tertib baik terhadap masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN Rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja SKPD Tahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Renja RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

- BAB IV TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Tahun Lalu

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun lalu sebelumnya dan disesuaikan dengan Renja kegiatan yang sedang berjalan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Restra OPD).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ***Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 4 (empat) bidang urusan yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.***

Selanjutnya Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 dievaluasi pelaksanaannya sebagaimana **Tabel 2.1** dibawah ini :

TABEL 2.1
EVALUASI RENJA DAN PENCAPAIAN RESTRA TAHUN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.TANJUNG JABUNG BARAT

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RESTRA OPD) s/d TA.2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TA.2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PORGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TA.2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET TA.2020	REALISASI TA.2020	TINGKAT (%) TA.2020		REALISAI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D THN BERJALAN (N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan admintrasi kantor dan pelayanan publik dapat berjalan lancar								
a.Jasa surat menyurat	Terlaksananya belanja peranko,materai, benda pos dan jasa pengiriman surat	12 Bulan	36 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
b.Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya belanja komunikasi air dan listrik	12 Bulan	36 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
c.Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	Terlaksananya honora-rium panitia pelaksana kegitan adminitrasi keuangan	12 Bulan	36 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
d.Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya belanja alat-alat kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan, serta jasa operator absen elektronik	12 Bulan	36 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
e. Penyediaan Alat tulis kantor	Terlaksananya belanja alat tulis kantor	12 Bulan	36 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 bulan	83%
f.Penyediaan komponen litrik dan penerangan bangunan kantor	Terlaksananya belanja komponen litrik dan penerangan	12 Bulan	36 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
g.Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya belanja bahan bacaan/koran	12 Bulan	36 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
h.Penyediaan makan dan minum rapat	Terlaksananya belanja makan dan minum	12 Bulan	0	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
i.Penyediaan barang cetak dan penggadaan	Terpenuhiya barang cetak dan penggadaan	12 Bulan	0	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
j.Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Terpenuhiya jaminan kesejahteraan petugas kebersihan	12 Bulan	36 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
k.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terikutinya rapat-rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	36 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.Pengadaan Peralatan gedung kantor b.Pengadaan kendaraan Dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) c.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d.Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas operasional e.Pemeliharaan rutin/ peralatan gedung kantor	Sarana dan prasarana aparatur dapat digunakan dengan kondisi layak Terlaksanya belanja komputer,lektop,CCTV penghancur kertas, dan belanja lain Terlaksanya belanja pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Terlaksananya pemeliharaan kantor Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan Dinas Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	15 unit komputer, 15 unit printer, 8 unit laptop 0 2 gedung 69 unit 45 unit	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (tidak ada) ket : 2016 (17 unit), 2017 (35 unit), 2018 (35 unit) ket : 2016 (Tidak ada), 2017 (1 unit gedung), 2018 (1 unit gedung) ket : 2016 (Tidak ada), 2017 (ada), 2018 (7 item)	0 1 Paket 69 Unit Komp 15 unit, 3 unitlektop/ Printer 15 unit, AC 1 unit Pengaadaan 1 set mesin absen (35 unit)	0 1 paket 69 unit Komp 15 unit, 3 unitlektop/ Printer 15 unit, AC 1 unit Pengaadaan 1 set mesin absen (35 unit)	0 100% 100% 100%	0 2 gedung /2 penjaga 51 unit 15 unit komputer, 15 unit printer 9 unit AC	15 unit komputer & 15 unit printer & 8 unit lektop 2 gedung 69 unit 45 unit	15 unit komputer & 15 unit printer & 8 unit lektop 2 gedung 69 unit 45 unit
Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapan b.Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tidak adanya pelanggaran disiplin sedang atau berat Terlaksananya pembelian pakaian dinas Terlaksananya pembelian pakaian lapangan petugas sampah	402 stel 140 stel	ket : 2016 (66 stel), 2017 (72 stel), 2018 (76 stel) ket : 2016 (tidak ada), 2017 (132 stel), 2018 (140 stel)	67 stel 0	67 stel 0	100% 0	67 stel 140 stel	335 stel 140 stel	83% 140 stel
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a.Pendidikan pelatihan formal	Meningkatnya kapasitas Aparatur DLH Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan diluar daerah	72 Bulan	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (12 bulan)	0	0	0	12 bulan	24 Bulan	33%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan-laporan Keuangan. b.Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sistem penyusunan laporan terlaksana dengan efektif dan efisien Tersusunnya laporan akhir tahun kegiatan Tersusunnya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja triwulan/Laporan kinerja tahunan (LAKIP) dan buku survei kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap pelayanan Lingkungan	2 laporan/8 buku 2 laporan/8 buku	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (tidak ada) ket : 2016 (4 laporan), 2017 (16 buku), 2018 (16 buku)	2 laporan/8 buku 2 buku/16 laporan	2 laporan/8 buku 2 buku/16 laporan	100% 100%	2 laporan/8 buku 2 laporan/8 buku	2 laporan/8 buku 2 laporan/8 buku	2 laporan/8 buku 2 laporan/8 buku

c.Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya dokumen prognosis (peramalan) realisasi anggaran (RESTRA SKPD,RENJA SKPD INDIKATOR KINERJA)	3 laporan/12 buku	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (tidak ada)	8 laporan/3 buku	8 laporan/3 buku	100%	3 laporan/12 buku	3 laporan/12 buku	3 laporan/12 buku
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	Meningkatnya kualitas kelompok pengelola sampah								
a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (JASTRADA)	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dlm pengelolaan persampahan pd masyarakat dan perusahaan	3 kali sosialisasi, 1 perusahaan, 1 kelurahan	ket : 2016 (Ada), 2017 (Tidak ada), 2018(Ada/90 orang)	0	0	0	0	3 kali sosialisasi/90 orang	3 kali sosialisasi/90 orang
b.Pembangunan sarana dan prasarana masyarakat dalam pengelolaan sampah	Terlaksananya pembangunan gedung/pengelolaan sampah/bank sampah/penyediaan peralatan pengolah sampah	1 paket	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (Tidak ada), 2018(tidak ada)	0	0	0	0	1 paket	1 paket
c.Peningkatan fungsi sungai dan Drainase	Pelaksanaan kebersihan sungai dan drainase	72 Bulan	36 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
d.Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan TPA untuk mewujudkan TPA ramah Lingkungan	72 bulan	36 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
e.Penyediaan Sarana dan Prasarana persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	72 bulan	36 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83%
f.Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kebersihan	Peralatan dan perlengkapan kebersihan dapat terjaga kondisinya dan layak pakai	74 unit	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (73 unit), 2018 (73 unit)	80 unit	80 unit	100%	51 unit	74 Unit	74 Unit
g.Pembuatan biogas	Terlaksananya pembuatan biogas dari kotoran ternak atau sampah	2 unit biogas	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (Tidak ada), 2018(tidak ada)	0	0	0	0	2 unit biogas	2 unit biogas
h.Pengelolaan dan pengendalian B3 dan Limbah B3	Terlaksananya pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3 dan pembinaan usaha skala kecil (USK) penghasil limbah B3	45 dunia usaha kegiatan	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (24 dunia usaha), 2018 (40 dunia usaha)	25 dunia usaha kegiatan	25 dunia usaha kegiatan	100%	40 Dunia usaha kegiatan	45 Dunia usaha kegiatan	45 Dunia usaha kegiatan

Program Pengendalian Pencemaran dan Pergerusakan Lingkungan	Persentase usaha / kegiatan yang menta-ti persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan								
a.Penaatan Hukum Lingkungan	Pelaksanaan pengawa-san terhadap ketaatan dunia usaha pada perundang-undangan Lingkungan	15 Dunia Usaha/kegiatan	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (55 usaha/keg/4 kali/10 buku/4 kali), 2018 (15 usaha/keg/5kali 55 kali)	15 Dunia usaha/ kegiatan	15 Dunia usaha/kegiatan	100%	15 Dunia Usaha/kegiatan	15 Dunia Usaha/kegiatan	15 Dunia Usaha/kegiatan
b.Koordinasi Penilaian Kota sehat/ Adipura	Terlaksananya koor-dinasi persiapan pe-mantauan Adipura, Sosialisasi Proklam dan Sosialisasi Kalpa taru	32 titik pantau Adipura pembinaan Proklam dan 1 kali Sosialisasi Kalpataru	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (32 titik)	32 titik pantau Adipura pembinaan Proklam dan 1 kali Sosialisasi Kalpataru	32 titik pantau Adipura pembinaan Proklam dan 1 kali Sosialisasi Kalpataru	100%	32 titik pantau /2 kali	32 titik pantau Adipura pembinaan Proklam dan 1 kali Sosialisasi Kalpataru	32 titik pantau Adipura pembinaan Proklam dan 1 kali Sosialisasi Kalpataru
c.Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Terlaksananya imple-mentasi dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL,UKL,UPL)	LAPORAN RKL-PKL 30 PERUSAHAN	ket: 2016 (24 buku), 2017 (20 dunia usaha), 2018 (tidak ada)	Laporan RKL-RPL dan 26 perusahaan	Laporan RKL-RPL dan 26 perusahaan	100%	15 dokumen,UKL - UPL 30 Dokumen SPPL 100 Dokumen	LAPORAN RKL-PKL 30 PERUSAHAN	LAPORAN RKL-PKL 30 PERUSAHAN
d.Koordinasi Penyusunan Amdal	Terlaksananya pem-hasan/penilaian do-kumen lingkungan (AMDAL,UKL,UPL dan SPPL) oleh Tim Teknis dan Tim komisi Amdal sesuai Permen LH No.8 Tahun 2013 serta koordinasi lintas sektor	10 Dokumen lingkungan (AMDAL,UKL, UPL)	ket: 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (10 dok)	10 Dokumen lingkungan (AMDAL,UKL, UPL)	10 Dokumen lingkungan (AMDAL,UKL, UPL)	100%	2 dokumen/UKL-UPL 20 Dokumen	10 Dokumen lingkungan (AMDAL,UKL, UPL)	10 Dokumen lingkungan (AMDAL,UKL, UPL)
e.Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan	Terlaksananya koor-dinasi dan pembinaan pengelolaan lingku-ngan pada uasaha pertambangan	Pertambangan : 4 Migas 7 Batu Bara 4 Split 8 Tanah Uruk	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (1 keg)	Pertambangan : 4 Migas 7 Batu Bara 4 Split 8 Tanah Uruk	Pertambangan : 4 Migas 7 Batu Bara 4 Split 8 Tanah Uruk	100%	35 lapangan minyak	Pertambangan : 4 Migas 7 Batu Bara 4 Split 8 Tanah Uruk	Pertambangan : 4 Migas 7 Batu Bara 4 Split 8 Tanah Uruk
f.Peningkatan Peran serta masya-rakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup	Terlaksananya sosia-lisasi Pengendalian Pencemaran dan pe-ngerusak lingkungan (Sosialisasi dokumen Lingkungan Hidup AMDAL,UKL_UPL, SPPL; penyusunan RK:-RPL (Permen no.45	4 kali sosialisasi (30 orang / desa/ sosialisasi Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara dan Keca-matan Merlung	ket : 2016 (20 keg, pertambangan), 2017 (3 keg), 2018 (2 kec)	0	0	0	0	4 kali sosialisasi (30 orang / desa/ sosialisasi Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara dan Keca-matan Merlung	4 kali sosialisasi (30 orang / desa/ sosialisasi Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara dan Keca-matan Merlung

	Tahun 1995) dan tata cara tambang tanah uruk dan sanitasi lingkungan								
g.Pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang Lingkungan Hidup	Tersusunnya Buku identifikasi kerusakan Lingkungan	1 Buku	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (tidak ada)	1 buku	1 buku	100%	Dunia usaha,1 buah papan inform,1 dokumen	1 Buku	1 Buku
h.Koordinasi kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)	Terlaksananya pengawasan usaha kegiatan pertambangan batu bara /batuan/tanah uruk	1 Kegiatan	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (tidak ada)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan
i.Pemantauan Kerusakan Lingkungan.	Terlaksananya pemantauan kreteria baku mutu kerusakan lingkungan	10 Titik	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (tidak ada)	0	0	0	1 Dokumen	10 Titik	10 Titik
j.Pengadaan Alat-alat Labotorium	Terlaksananya Belanja Alat-alat Labotorium	0	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (tidak ada)	0	0	0	0	1 kegiatan	1 kegiatan
k.Koordinasi Pengelolaan prokasih /Superkasih	Terlaksananya pengelolaan kebersihan sungai	1 kegiatan	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (tidak ada)	0	0	0	o		
l.Mini loka karya pengendalian pencemaran	Meningkatnya pengetahuan SDM terhadap pengendalian kerusakan danpencemaran Lingkungan oleh Aparatur kecamatan/ desa/pelaku usaha/ tokoh masyarakat	1 kegiatan	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (tidak ada)	0	0	0	0	1 kegiatan	1 kegiatan
m.Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	Meningkatnya pengetahuanSDM terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1 kegiatan	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (tidak ada)	0	0	0	0	1 kegiatan	1 kegiatan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Deteksi dini potensi pencemaran lingkungan								
a.Pemantauan Kualitas Badan Air Sungai	Terlaksananya pemantauan kualitas limbah cair perusahaan, air, sungai, dan air laut (pesisir) dan sosialisasi pengendalian mutu baku lingkungan (limbah cair ,polusi, udara, dan tanah)	18 perusahaan 12 sungai, pesisir	ket : 2016 (18 perusahaan 12 sungai), 2017 (18 perusahaan/usaha/keg/11 sungai dan pesisir), 2018 (13 perusahaan/keg/10 pesisir dan keg	8 perusahaan, 6 sungai dan pesisir	8 perusahaan, 6 sungai dan pesisir	100%	22 perusahaan/ 10 sungai	18 perusahaan 12 sungai, pesisir	18 perusahaan 12 sungai, pesisir
b.Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Terlaksananya pengujian emisi/polusi pada perusahaan	14 Perusahaan	ket : 2016 (14 perusahaan), 2017 (14 perusahaan), 2018 (4 perusahaan/2 dalam kota)	10 perusahaan	10 perusahaan	100%	8 Perusahaan 2 kota KA.TKL	14 Perusahaan	14 Perusahaan
c.Peningkatan peran serta masya-	Terlaksananya kegia-	3 Kegiatan	ket : 2016 (tidak ada) 2017 (3	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan

kat dalam pengembangan kualiti Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	tan sosialisasi Adwiyata kegiatan lintas sektoral (P2WKSS, BBGRM)		ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (450 bibit)	0	0	100%	600 batang Bibit	15.000 bibit Magrove dan 1000 bibit penghijauan	15.000 bibit Magrove dan 1000 bibit penghijauan
d.Penanaman Bibit Magrove dan Bibit Penghijauan/Pohon Pelindung	Terlaksananya penanaman bibit magrove dan Bibit penghijauan	15.000 bibit Magrove dan 1000 bibit penghijauan							
Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya akses dan jejaring informasi Lingkungan Hidup								
a.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya sosialisasi pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup (Limbah B3, Proper, SIPIL, IPAL, LA)	1 kali sosialisasi	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (55 usaha keg)	0	0	0	usaha/keg,PMKS, Migas pinang	1 kali sosialisasi	1 kali sosialisasi
b.Identifikasi Sumber Daya Alam Pengembangan data dan Informasi Lingkungan	Terikutinya Pekan Lingkungan Hidup di Jakarta dan Terlaksananya peringatan Hari Lingkungan Hidup	1 kegiatan HLH dan 1 kegiatan PLI	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018 (4 keg)	4 Kali Kegiatan	4 kali kegiatan	100%	2 kali/2 kec	1 kegiatan HLH dan 1 kegiatan PLI	1 kegiatan HLH dan 1 kegiatan PLI
c.Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan	Tersusunnya dokumen SLHD dan Neraca SDA	2 Dokumen	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018(tidak ada)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
d.Peningkatan edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang LH	Terlaksananya operasional Pos Pengaduan Pengrusakan Lingkungan dan Terlaksananya sosialisasinya pengenalan dan Publikasi pengaduan pengrusakan lingkungan Hidup	1 Kegiatan	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018(tidak ada)	0	0	0	13 kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
e.Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	0	ket : 2016 (tidak ada), 2017 (tidak ada), 2018(tidak ada)	0	0	0	0	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Seiring dengan terus berkembangnya wilayah kabupaten dan ibu kota, tentu memiliki permasalahan Lingkungan Hidup dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini membutuhkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan baik seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan maksud melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan ***Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat*** memiliki tugas membidangi Tata Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas. Berikut tabel analisis kinerja pelayanan OPD :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya seoptimal mungkin memberikan pelayanan dasar dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

Berikut Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian	Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL / AMDAL)	100%	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL / AMDAL) terhadap seluruh usaha / kegiatan yang wajib UKL-UPL / AMDAL	100%	100%	100%	90%	100%	
2	Jumlah usaha dan kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran air	100%	Persentase dunia usaha dan kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran air	65	80	92	60	92	
3	Jumlah usaha dan kegiatan tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran udara	100%	Persentase usaha dan kegiatan tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran udara	100%	100%	100%	90%	100%	
4	Luas lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan tanah pada periode biomassa (Ha)	100%	Persentase lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan tanah pada periode biomassa (Ha)	-	-	-	-	-	
5	Jumlah pengaduan yang diterima	100%	Persentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	90%	100%	
6	Jumlah volume sampah setiap tahunnya	100%	Persentase penangana /pengelolaan sampah	63.00 3 Ton	65.00 0 Ton	70.00 0 Ton	15.286 Ton	70.000 Ton	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

1. Dibidang Persampahan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih, terutama di Kota Kuala Tungkal. Terlihat dari data volume sampah yang dari tahun ketahun selalu meningkat, volume sampah dikota kuala tungkal mencapai 14.887 Ton di Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebanyak 15.286 Ton, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah domestik dan rumah tangga juga keterbatasan dana untuk mengolah daur ulang sampah. Pertumbuhan pemukiman penduduk yang tinggi didaerah perkotaan sebagai ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat diakibatkan karena aktivitas ekonomi dan pusat pemerintahan, sehingga menyebabkan pemukiman didaerah ini menjadi semakin padat. Hal ini memacu peningkatan permintaan lahan dan daya dukung lingkungan untuk pemukiman atau perumahan, keterbatasan lahan di Kecamatan Tungkal Ilir Khususnya Kota Kuala Tungkal yang berada di daerah dataran rendah merupakan daerah genangan air, Tidak sedikit areal bantaran sungai yang dijadikan tempat pemukiman yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendangkalan sungai, ini menjadi salah satu penyebab banjir atau naiknya air laut melimpah kejalan ketika terjadi pasang besar (rob) pada bulan – bulan tertentu. Banyak pertumbuhan dunia usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdampak terhadap lingkungan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas atau kerusakan lingkungan karena air limbah yang mengalir di pesisir sungai dan laut yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk pengukuran Titik sampling diperlukan penambahan titik sampling pengukuran udara dan air serta untuk melakukan pengukuran sendiri Indeks Tutupan Lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar nilai Indeks Lingkungan yang dihasilkan dapat mewakili kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tahun 2019 Indeks Kualitas Air (IKA) 61, 429, Indeks Kualitas Udara (IKU) 90,12 (kualitas Baik) pengukuran ini belum ada polusi kabut atau asap, Indeks Kualitas Lahan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri

masih belum pernah perhitungan sendiri dan dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi pada Tahun 2016 yakni 52,09.

3. Dibidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 minimnya Sumber Daya Alam manusia (instrument pengawas) yang menguasai bidang hokum lingkungan masih kurang.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir (2016 – 2020), dalam pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan, demikian pula upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup yang belum sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang mana belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Keadaan ini diperburuk lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat di prediksi sesuai prakiraan yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir diseluruh belahan dunia, disamping itu yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforesitasi dan degradasi hutan dan lahan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 – 2025, masih akan dihadapkan pada permasalahan yang sama, khususnya pencemaran sampah dalam Ibu kota Kabupaten/ Kecamatan, Pencemaran air, udara, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, sedangkan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS), umumnya masih berada di bawah baku mutu, selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk hutan mangrove (bakau) dan aliran fungsi pohon terutama lahan gambut pertanian menjadi lahan - lahan perkebunan, juga merupakan salah satu faktor mempercepat menurunnya kualitas lingkungan baik di air, darat dan udara.

Persoalan lainya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim (Climate Change) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan

berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26% pada tahun 2020, merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2021-2025 melalui Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif baik pada aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, tetapi merupakan peluang dan tanggung jawab bersama untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi terhadap tugas dan pelayanan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanannya sebagai berikut :

- a) Masih sedikitnya jumlah personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menguasai teknik – teknik pengendalian dampak lingkungan.
- b) Masih lemahnya kinerja personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c) Masih lemahnya proses komunikasi timbal balik antara Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pihak yang berkompeten dan stakeholder lainnya.
- d) Masih kurangnya kendaraan operasional untuk kelengkapan.

2.4. Tabel Review Rancangan Rencana Kerja 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2022		Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				2022		2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.			
3			4	5	6	8		8	14	15
X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.505.915.000	10.505.915.000		DLH
			2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	terlaksananya penyusunan anggaran dan mengevaluasi anggaran DLH tiap bulan dan tahun		1.400.000.000	1.400.000.000	sekretariat	DLH
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terlaksananya penyusunan renstra dan renja DLH	100%	5 Laporan& 3 Laporan / 12 bln 200.000.000	5 Laporan& 3 Laporan / 12 bln 200.000.000		DLH
			02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	melaksanakan koordinasi dalam penyusunan RKA DLH	100%	5 Dokumen/12 Bulan 200.000.000	5 Dokumen/12 Bulan 200.000.000		DLH
			03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perubahan RKA DLH	100%	3 Dokumen/12 Bulan 200.000.000	3 Dokumen/12 Bulan 200.000.000		DLH
			04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	melaksanakan koordinasi dalam penyusunan DPA DLH	100%	12 Bulan 200.000.000	12 Bulan 200.000.000		DLH
			05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perubahan DPA - DLH	100%	12 Bulan 200.000.000	12 Bulan 200.000.000		DLH
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya koordinasi dalam penyusunan LKJLP dan LKPJ DLH	100%	12 Laporan/12 Bulan 200.000.000	12 Laporan/12 Bulan 200.000.000		DLH
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya evaluasi laporan dokumen bulanan DLH	100%	4 Laporan Restra&Renja/12 Bulan 200.000.000	4 Laporan Restra&Renja/12 Bulan 200.000.000		DLH
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD		4.227.915.000	4.227.915.000		DLH
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12 Bulan 3.267.915.000	12 Bulan 3.267.915.000		DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2022		Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2022		2022			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	100%	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	DLH
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan DLH	100%	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	DLH
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	terlaksananya akuntansi keuangan DLH	100%	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	DLH
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun DLH	100%	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	80.000.000	DLH
	06	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	DLH
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan DLH	100%	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	DLH
	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran setiap tahun	100%	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	80.000.000	DLH
	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventarisasi			300.000.000		300.000.000	DLH
	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya pengamanan barang/asset milik daerah pada DLH	100%	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	DLH
	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah DLH	100%	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	DLH
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	tersedianya penatausahaan barang milik daerah pada DLH	100%	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	DLH
	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan			400.000.000		400.000.000	DLH
	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	100%	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	DLH
	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	terlaksananya pengolahan data retribusi daerah	100%	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	DLH
	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	terlaksananya penetapan wajib retribusi daerah	100%	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	DLH
	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	tersusunnya pelaporan pengelolaan retribusi daerah	100%	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	DLH
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN			430.000.000		430.000.000	DLH
	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	sasaran prasarana peningkatan disiplin aparaturnya dapat digunakan dengan kondisi layak (mesin absen elektronik dan manual)	90%	12 bln	80.000.000	12 bln	80.000.000	DLH
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	69 stel	50.000.000	69 stel	50.000.000	DLH
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	tersusunnya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (DUK, Struktur organisasi/kepangkatan)	90%	12 bln	80.000.000	12 bln	80.000.000	DLH
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kantor	tersedianya sistem informasi kantor (buku profil dan website OPD)	80%	1 buku/ 12 bln	70.000.000	1 buku/ 12 bln	70.000.000	DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2022		Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2022		2022			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	tersedianya dokumen penilaian kinerja pegawai (SKP)	100%	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	DLH
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terikutinya bimtek/ pelatihan pegawai	70%	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	DLH
	2.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum			638.000.000		638.000.000	DLH
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Belanja Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	DLH
	02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Belanja Alat Tulis Kantor	100%	12 Bln	100.000.000	12 Bln	100.000.000	DLH
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Belanja Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	DLH
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Belanja Makan & Minum Rapat	100%	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	DLH
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100%	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	DLH
	06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Belanja Surat Kabar & Majalah	100%	12 Bln	10.000.000	12 Bln	10.000.000	DLH
	07	Penyediaan Bahan/ Material	Terpenuhinya Belanja Bahan Material	100%	12 Bln	50.000.000	12 Bln	50.000.000	DLH
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Tamu Yang Datang	100%	12 Bln	8.000.000	12 Bln	8.000.000	DLH
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Tersedianya Kebutuhan Akomodasi Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	100%	12 Bln	350.000.000	12 Bln	350.000.000	DLH
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD penunjang Urusan OPD			515.000.000		515.000.000	DLH
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Belanja Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	-Kendaraan Roda Dua 5 unit	200.000.000	-Kendaraan Roda Dua 5 unit	200.000.000	DLH
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Belanja Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100%	-	-	-	-	DLH
	03	Pengadaan Alat Besar	Terlaksananya Belanja Alat Besar	100%	-	-	-	-	DLH
	04	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Terlaksananya Belanja alat angkutan darat tak bermotor	100%	-	-	-	-	DLH
	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Belanja Mebel	100%	-	-	-	-	DLH
	06	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Terlaksananya Belanja Peralatan & Mesin Lainnya	100%	-	-	-	-	DLH
	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Belanja Aset Lainnya	100%	-	-	-	-	DLH
	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Belanja Aset Tak Berwujud	100%	-	-	-	-	DLH
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Belanja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	-	-	-	-	DLH
	10	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Belanja Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	-Laptop 3 unit -Set Komputer 13 unit	315.000.000	-Laptop 3 unit -Set Komputer 13 unit	315.000.000	DLH
	11	Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Belanja Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%					DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2022		Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2022		2022			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		395.000.000		395.000.000		DLH
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Belanja Prangko, materai, benda pos & jasa pengiriman surat	100%	12 Bln	5.000.000	12 Bln	5.000.000	DLH
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Terlaksananya Pembayaran Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	100%	12 Bln	180.000.000	12 Bln	180.000.000	DLH
	03	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Belanja Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	100%	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	DLH
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Belanja Alat - alat kebersihan kantor & jasa tenaga kebersihan	100%	12 Bln	60.000.000	12 Bln	60.000.000	DLH
	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.200.000.000		2.200.000.000	DLH
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Sopir, Biaya Pemeliharaan, Perbaikan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	DLH
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	DLH
	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Perizinan Alat Berat	Terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Perizinan Alat Berat	100%	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	DLH
	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Baiaya Pemeliharaan & Perizinan alat angkutan darat tak bermotor	Terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan , Baiaya Pemeliharaan & Perizinan alat angkutan darat tak bermotor	100%	12 bln	200.000.000	12 bln	200.000.000	DLH
	05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya Baiaya Pemeliharaan Mebel	100%	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	DLH
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya Biaya pemeliharaan peralatan & mesin lainnya	100%	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	DLH
	07	Pemeliharaan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan Aset Lainnya	100%	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	DLH
	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	100%	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	DLH
	09	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Biaya pemeliharaan Belanja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	DLH
	10	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Biaya Belanja Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	DLH
	11	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Biaya Belanja Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	DLH
2	11	Usuran Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							DLH
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	520.000.000	3 Dokumen	520.000.000	DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2022		Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				2022		2022				
				Target	Rp.	Target	Rp.			
	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota	terlaksananya penyusunan dokumen DDDTLH, Dokumen RPPLH yang dilegalisasi	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	70.000.000		DLH	
	01	Penyusunan & Penetapan RPPLH Kab/Kota	dokumen DDDTLH, dokumen RPPLH dan legalisasi RPPLH	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen legalisasi (DDDTLH)	70.000.000		DLH	
	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KHLS) Kab/kota	jumlah KLHS	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	450.000.000		DLH	
	01	Pembuatan & Pelaksanaan KHLS Rencana Tata Ruang	dokumen KHLS RDTR kawasan perkotaan/ perdesaan	1 dokumen	450.000.000	2 dokumen (KLHS RDTR)	450.000.000		DLH	
	02	Pembuatan dan pelaksanaan KHLS RPJPD/RPJMD	dokumen KHLS RPJPD/ RPJMD	1 dokumen	-	-	-		DLH	
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/IKU/IKTL/IKAL/IKEG	65/94,2/55,5/77,1/73,8	925.000.000	65/94,2/55,5/77,1/73,8	925.000.000		DLH
	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Laporan	640.000.000	2 Laporan	640.000.000		DLH	
	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara.	Indeks kualitas tutupan lahan, indeks kualitas air, indeks kualitas udara.	IKA : 64,3 IKU : 93,68 IKTL : 52,09	490.000.000	IKA : 65 IKU : 94,2 IKTL : 55,5	490.000.000	DLH (PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN)	DLH	
	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen RAD GRK, dokumen pemantauan emisi GRK	-	150.000.000	Dokumen RAD GRK Kab. Tanjung Jabung Barat (2 Dokumen)	150.000.000	DLH (PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN)	DLH	
	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	terlaksananya upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	100%	135.000.000	100%	135.000.000		DLH	
	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	sosialisasi ke masyarakat	3 papan informasi	135.000.000	4 Kali Sosialisasi 2 Papan Informasi	135.000.000	DLH BID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	DLH	
	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	indeks tutpan lahan (ITL) kabupaten tanjung jabung barat	1 buku/dokumen					DLH	
	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya pengelolaan kebersihan sungai	100%					DLH	
	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000		DLH	
	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan restorasi	Dokumen Rencana Pengelolaan areal Gambut restorasi	-	150.000.000	Dokumen Pemetaan dan Identifikasi areal Gambut Tanjabbar (1 Dokumen)	150.000.000		DLH	
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	70%	4.760.000.000	70%	4.760.000.000		DLH
	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	70%	4.760.000.000	70%	4.760.000.000		DLH	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2022		Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				2022		2022						
				Target	Rp.	Target	Rp.					
	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan legalisasi		1 dokumen masterplan RTH seluruh kabupaten	400.000.000	1 dokumen masterplan RTH seluruh kabupaten	400.000.000	DLH (PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH		
	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH yang dikelola	Persentase RTH yang dikelola	1 lokasi pendataan (Kec. Tungkal Ilir) (Desa tunggal 1)	3.360.000.000	1 lokasi pendataan (Kec. Tungkal Ilir) (Desa tunggal 1)	3.360.000.000		DLH		
	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	meningkatnya sebaran wilayah (lokasi) daerah daratan dan pesisir pantai	100%						DLH		
	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah bibit/unit	Terlaksana nya penanaman (Di desa tunggal 1)	1500 bibit 1500 pancang	1.000.000.000	1500 bibit 1500 pancang	1.000.000.000		DLH		
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Peresentase pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) pada usaha/kegiatan		100%	90.000.000	100%	90.000.000		DLH	
		2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3		100%	90.000.000	100%	90.000.000		DLH	
		02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	3 rekomendasi yang telah dikeluarkan	100%	90.000.000	100%	90.000.000	DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	DLH	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		100%	390.000.000	100%	390.000.000		DLH	
		2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	390.000.000	100%	390.000.000		DLH	
		01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dan jumlah sosialisasi	100%		15 dokumen	110.000.000	15 dokumen	110.000.000	DLH BID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	DLH
		02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas PPLH dan Fungsional PEDAL	100%		2 orang	60.000.000	2 orang	60.000.000		DLH
		03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dunia usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup/proper	100%		21 perusahaan	120.000.000	21 perusahaan	120.000.000		DLH
		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	jumlah pengawasan dan penerapan sanksi	100%		21 perusahaan	100.000.000	21 perusahaan	100.000.000		DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2022		Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				2022		2022						
				Target	Rp.	Target	Rp.					
2	11	07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	70%	160.000.000	70%	160.000.000		DLH	
		2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat	2 Kecamatan	80.000.000	2 Kecamatan	80.000.000		DLH	
		01		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	2 kecamatan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2 kecamatan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	80.000.000	80.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH
		2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelembagaan MHA yang dibina	1 Kelembagaan	80.000.000	1 Kelembagaan	80.000.000		DLH	
		01		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelembagaan MHA yang dibina di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Kelembagaan MHA	80.000.000	1 Kelembagaan MHA	80.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH	
2	11	08	2.01	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peresentase masyarakat kecamatan yang meningkat pengetahuan/ pemahaman terkait lingkungan hidup	70%	130.000.000	70%	130.000.000		DLH	
		2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, & Penyuluhan Lingkungan Hidup, untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah sosialisasi/pelatihan	6 sekolah	130.000.000	6 sekolah	130.000.000		DLH	
		01		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	jumlah sosialisasi/pelatihan	2 sekolah yang telah di bina 2 sd (sd 160 merlung dan sd 5 kuala tungkal)	6 sekolah (SD/SMP) dan penilaian lintas sektor	6 sekolah (SD/SMP) dan penilaian lintas sektor	130.000.000	130.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH
2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	CAKUPAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	65%	150.000.000	65%	150.000.000		DLH	
		2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perolehan penghargaan kota sehat adipura/ kalpataru/sekolah adiwiyata/Dokumen IKPLHD/ SLHD	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000		DLH	
		01		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	perolehan penghargaan kota sehat adipura/ kalpataru/sekolah adiwiyata/Dokumen IKPLHD/ SLHD	1 dokumen	Pembinaan dan Pemantauan Titik Pantau Adipura/ 1 dokumen (IKPLHD)	Pembinaan dan Pemantauan Titik Pantau Adipura/ 1 dokumen (IKPLHD)	150.000.000	150.000.000	DLH (PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN) & TATA LINGKUNGAN	DLH

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2022		Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2022			
							Target	Rp.	Target	Rp.		
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI		100%	145.000.000	100%	145.000.000		DLH
			2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		100%	145.000.000	100%	145.000.000		DLH
				01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH
				02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	jumlah sanksi administrasi/penyelesaian sengketa dan atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	100%	10 Dunia Usaha	70.000.000	10 Dunia Usaha	70.000.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		83%	22.550.000.000	83%	22.550.000.000		DLH
			2.01	Pengelolaan Sampah	persentase Pengelolaan Sampah		83%	22.550.000.000	83%	22.550.000.000		DLH
				01 Penyusunan Kebijakan & Staretegis Daerah Pengelolaan Sampah Kab/kota	Dokumen Jakstrada/legalisasi Masterplan Persampahan	Perbup Tanjung Jabung Barat No. 56 Tahun 2018	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	110.000.000	DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	DLH
				03 penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	tonase sampah yang terangkut/petugas kebersihan/petugas TPA	16.425 Ton/M ³ /320 / 19 orang	75.000 Ton	7.500.000.000	75.000 Ton	7.500.000.000		DLH
				04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	jumlah sosialisasi/pelatihan 3R/bank sampah		3 kali sosialisasi	150.000.000	3 kali sosialisasi	150.000.000		DLH
				05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	terpenihunya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	100%						DLH
				06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan yang terlegalitas	5 rekomendasi	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000		DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Ranwal Tahun 2022		Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2022		2022			
				Target	Rp.	Target	Rp.		
07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah TPST3R/unit/alat berat	4 TPST3R/Dumptruck 7 unit (1 rusak berat)/ Excavator 2 unit (1 rusak ringan)/ bacholder 1 unit (rusak berat)/ Armroll 1 unit / peralatan kebersihan	-Excavator 1 unit -Mesin genset listrik 1 unit -Mesin Pemotong Rumput 2 unit -sumur bor 1 unit - peralatan kebersihan 470 unit (cangkul,skop,scrab,sapu lidi, linggis, godam) -perencanaan TPA penyangga (Pengadaan Lokasi) -container 3 unit - mesin penyedot air 1 unit -mesin pompa air 1 unit - pengadaan pakaian petugas kebersihan 320 unit -pengadaan sepatu petugas kebersihan -BBM kendaraan operasional kebersihan/TPA -suku cadang kendaraan operasional kebersihan/TPA -service kendaraan operasional kebersihan/TPA -Dump truck 3 unit -Viar 6 unit - gerobak sampah besi 6 unit - Tong sampah fiber 10 unit -incinerator 3 unit	14.710.000.000	-Excavator 1 unit -Mesin genset listrik 1 unit -Mesin Pemotong Rumput 2 unit -sumur bor 1 unit - peralatan kebersihan 470 unit (cangkul,skop,scrab,sapu lidi, linggis, godam) -perencanaan TPA penyangga (Pengadaan Lokasi) -container 3 unit - mesin penyedot air 1 unit -mesin pompa air 1 unit - pengadaan pakaian petugas kebersihan 320 unit -pengadaan sepatu petugas kebersihan -BBM kendaraan operasional kebersihan/TPA -suku cadang kendaraan operasional kebersihan/TPA -service kendaraan operasional kebersihan/TPA -Dump truck 3 unit -Viar 6 unit - gerobak sampah besi 6 unit - Tong sampah fiber 10 unit -incinerator 3 unit	14.710.000.000		DLH
					40.325.915.000		40.325.915.000		

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE
Pembina TK I/ Ivb
NIP. 19680116 199703 1 002

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dibuat berdasarkan inventarisasi permasalahan – permasalahan yang ada secara nasional, antara lain: a) Kebakaran hutan dan lahan b) Kerusakan hutan akibat hutan open access yang tidak terkelola; c) terjadinya lahan kritis; d) besarnya beban pencemar; e) pelanggaran tata ruang dan perijinan. Tidak hanya bencana lingkungan yang cenderung semakin meningkat, namun juga terjadi semakin maraknya konflik sosial, adanya kesenjangan kondisi antar ekoregion/pulau, ketimpangan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Berbagai situasi tersebut sesungguhnya merupakan produk kumulatif dari pembangunan berbagai sector antara lain:

- a) belum terselesaikannya persoalan hak-hak atas SDA dan pengelolaannya secara adil ;
 - b) kebijakan pembangunan yang masih kuat di implementasikan pada tataran produksi dan eksploitasi SDA, sedangkan pengendalian daya dukung lingkungan hidup melalui kerja sama antar wilayah administrasi belum kuat;
 - c) kebijakan anggaran berbasis lingkungan yang belum terwujud dengan baik, termasuk juga internalisasi biaya lingkungan dan dampaknya kedalam biaya produksi;
 - d) belum efektifnya upaya konservasi dan rehabilitasi dari berbagai aspek seperti : rendahnya insentif dan disinsentif, ketepatan ukuran kinerja, pendekatan yang hanya berbasis proyek;
 - e) kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat hanya dilakukan pada bagian hilir dari proses pembangunan saja, namun penyelesaiannya perlu diperkuat untuk masuk ke hulu atau akar masalah.
-

Isu strategis untuk mengatasi permasalahan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang nantinya perlu dituangkan dalam RPPLH Nasional antara lain:

- a) *Informasi dan Manajemen Pengetahuan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.*
Informasi dan pengetahuan sangat penting untuk selalu diperbarui untuk menjadi dasar bagi pengendalian pembangunan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Keterbukaan informasi bagi stakeholders, termasuk status LH dan transparansi perizinan pemanfaatan SDA, akan menjadi sumber pengetahuan dan pengawasan LH oleh publik.
 - b) *Kapasitas Lembaga dan Pengorganisasian dalam Implementasi Kebijakan Kepemimpinan dan kapasitas jaringan kerja yang kuat pada seluruh stakeholder dalam arti luas di pusat maupun daerah yang terkait dengan penguatan dan implementasi secara efektif kebijakan PPLH termasuk PSDA.* Dengan pemahaman bahwa kinerja perlindungan dan pengelolaan LH sangat ditentukan oleh perilaku seluruh stakeholder. Perbaikan kinerja LH yang menuntut visi jangka panjang cenderung kurang harmonis dengan arah pembangunan ekonomi dan politik eksploitasi SDA jangka pendek sehingga kerusakan lingkungan terus terjadi. Dampak kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dibatasi oleh batas administrasi ataupun batas yurisdiksi sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat tergantung pada kerjasama antar wilayah administrasi maupun antar sektor. Penetapan program pembangunan bersama antar wilayah administrasi dan antar sector dengan mempertahankan daya dukung lingkungan menjadi keniscayaan. Untuk menghindari konflik kepentingan antar pihak dalam membangun program pembangunan bersama tersebut, perlu dibangun leadership Lingkungan Hidup yang antara lain mengembangkan jejaring LH termasuk dengan para pihak di luar pemerintah (LSM, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, DPR/D, dll).
 - c) *Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam (SDA)*
SDA yang terkait dengan penggunaan lahan, seperti hutan, tambang, dan kebun sudah sampai
-

Pada kondisi kritis, bukan hanya menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk hilangnya sumber-sumber air bersih, tetapi juga menjadi sumber konflik dan ketidakadilan pemanfaatannya. Di sisilainnya, sumber daya perairan/laut masih belum optimal pemanfaatannya, terjadi kemiskinan nelayan di satu sisi dan di sisi lain telah terjadi kerusakan habitat dan over eksploitasi beberapa jenis ikan. Untuk melakukan penghematan dan pencadangan pemanfaatan SDA secara umum.

- d) Perlindungan dan pemulihan daya dukung. Terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemulihan daya dukung, termasuk pemulihan masalah sosial, merupakan hal yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan kelembagaan untuk perlindungan dan konservasi SDA, terutama di kawasan lindung, perlu mendapat prioritas antara lain melalui penerapan kebijakan ekonomi, regulasi dan insentif LH.
 - e) Pengendalian beban lingkungan hidup Kapasitas pengendalian beban lingkungan hidup di Indonesia tidak sebanding dengan sebaran lokasi sumber pencemar yang sangat luas. Sementara itu kebijakan penataan ruang dan kebijakan lainnya belum mampu menanggulangi semakin terkonsentrasinya beban lingkungan hidup di wilayah-wilayah perkotaan, pelabuhan dan industri. Terkait dengan pengendalian beban lingkungan hidup diperlukan prioritas pada kawasan khusus seperti urban-perkotaan, pelabuhan, industri, dll sebagai wilayah target pengendalian beban lingkungan.
 - f) Kebijakan Penegakan hukum. Disamping itu, peningkatan kapasitas tersebut perlu pula diwujudkan melalui pengembangan jejaring hokum lingkungan Kapasitas yustisia dalam penegakan hokum lingkungan perlu diperluas dengan mengkaitkan pelanggaran hokum lingkungan hidup dengan penataan ruang, pencegahan perusakan hutan, pencucian uang, tindak pidana korupsi, dll. Sehingga terwujud luster-kluster di setiap wilayah ekoregion.
-

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja (Renja OPD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Berdasarkan rumusan visi dan misi tersebut diatas, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh *Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021 – 2026.*

Tujuan Dari Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- 1. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten yang berkelanjutan;*
- 2. Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup;*

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, maka *Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran – sasaran strategis yaitu dijelaskan Pada Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibawah ini :*

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun ke-)						Sumber Data
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Pengelolaan Sampah	-Uji Labor Karakteristik Limbah B3 -Inventarisir Limbah B3 -Rekomendasi Teknis Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
				$\frac{\text{Timbulan Sampah Tertangani (Ton/Tahun)}}{\text{Jumlah Potensi Timbulan Sampah (Ton/Tahun)}} \times 100$	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	21.045,28	23.255,04	24.632,45	26.055,66	28.475,11	30.475,11	
			Persentase usaha/kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	JUK : JIL x 100 (JUK) Jumlah Usaha Kegiatan (JIL) Jumlah Izin Lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	85	90	95	100	100	100	Bidang Tata Lingkungan Hidup
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE
Pembina TK I/ IV b
NIP. 19680116 199703 1 002

BAB IV

RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi jangka menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang diukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi sesuatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Penyusunan Rancangan Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan APBD dan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana strategis (RESTRAS) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Rancangan Rencana Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode fikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022			
3				4	5	6	Target	Rp.	14	15
X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.505.915.000		DLH
			2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	terlaksananya penyusunan anggaran dan mengevaluasi anggaran DLH tiap bulan dan tahun			1.400.000.000	sekretariat	DLH
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terlaksananya penyusunan renstra dan renja DLH	100%	5 Laporan & 3 Laporan / 12 bln	200.000.000		DLH
			02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	melaksanakan koordinasi dalam penyusunan RKA DLH	100%	5 Dokumen/12 Bulan	200.000.000		DLH
			03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perubahan RKA DLH	100%	3 Dokumen/12 Bulan	200.000.000		DLH
			04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	melaksanakan koordinasi dalam penyusunan DPA DLH	100%	12 Bulan	200.000.000		DLH
			05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perubahan DPA - DLH	100%	12 Bulan	200.000.000		DLH
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya koordinasi dalam penyusunan LKJLP dan LKPJ DLH	100%	12 Laporan/12 Bulan	200.000.000		DLH
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya evaluasi laporan dokumen bulanan DLH	100%	4 Laporan Restra & Renja/12 Bulan	200.000.000		DLH
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD			4.227.915.000		DLH
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12 Bulan	3.267.915.000		DLH
			02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	100%	12 Bulan	300.000.000		DLH
			03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan DLH	100%	12 Bulan	200.000.000		DLH
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	terlaksananya akuntansi keuangan DLH	100%	12 Bulan	100.000.000		DLH
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun DLH	100%	12 Bulan	80.000.000		DLH
			06	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	12 Bulan	100.000.000		DLH
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan DLH	100%	12 Bulan	100.000.000		DLH
			08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran setiap tahun	100%	12 Bulan	80.000.000		DLH
			2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventarisasi			300.000.000		DLH
			02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya pengamanan barang/asset milik daerah pada DLH	100%	12 Bulan	100.000.000		DLH
			05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah DLH	100%	12 Bulan	100.000.000		DLH
			06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	tersedianya penatausahaan barang milik daerah pada DLH	100%	12 Bulan	100.000.000		DLH
			2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan			400.000.000		DLH
			03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	100%	12 Bulan	100.000.000		DLH
			05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	terlaksananya pengolahan data retribusi daerah	100%	12 Bulan	100.000.000		DLH
			06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	terlaksananya penetapan wajib retribusi daerah	100%	12 Bulan	100.000.000		DLH
			07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	tersusunnya pelaporan pengelolaan retribusi daerah	100%	12 Bulan	100.000.000		DLH
			2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN			430.000.000		DLH
			01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	sasaran prasarana peningkatan disiplin aparaturnya dapat digunakan dengan kondisi layak (mesin absen elektronik dan manual)	90%	12 bln	80.000.000		DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2022			
				Target	Rp.		
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	69 stel	50.000.000	DLH
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	tersusunnya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (DUK. Struktur organisasi/kepangkatan)	90%	12 bln	80.000.000	DLH
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kantor	tersedianya sistem informasi kantor (buku profil dan website OPD)	80%	1 buku/ 12 bln	70.000.000	DLH
	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	tersedianya dokumen penilaian kinerja pegawai (SKP)	100%	12 bulan	50.000.000	DLH
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terikutinya bimtek/ pelatihan pegawai	70%	12 Bulan	100.000.000	DLH
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum			638.000.000	DLH
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Belanja Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	12 Bln	50.000.000	DLH
	02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Terselaksananya Belanja Alat Tulis Kantor	100%	12 Bln	100.000.000	DLH
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Belanja Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	12 Bln	50.000.000	DLH
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Belanja Makan & Minum Rapat	100%	12 Bln	10.000.000	DLH
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100%	12 Bln	10.000.000	DLH
	06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Belanja Surat Kabar & Majalah	100%	12 Bln	10.000.000	DLH
	07	Penyediaan Bahan/ Material	Terpenuhinya Belanja Bahan Material	100%	12 Bln	50.000.000	DLH
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Tamu Yang Datang	100%	12 Bln	8.000.000	DLH
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Tersedianya Kebutuhan Akomodasi Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	100%	12 Bln	350.000.000	DLH
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD penunjang Urusan OPD			515.000.000	DLH
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Belanja Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	-Kendaraan Roda Dua 5 unit	200.000.000	DLH
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Belanja Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100%	-	-	DLH
	03	Pengadaan Alat Besar	Terlaksananya Belanja Alat Besar	100%	-	-	DLH
	04	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Terlaksananya Belanja alat angkutan darat tak bermotor	100%	-	-	DLH
	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Belanja Mebel	100%	-	-	DLH
	06	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Terlaksananya Belanja Peralatan & Mesin Lainnya	100%	-	-	DLH
	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Belanja Aset Lainnya	100%	-	-	DLH
	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Belanja Aset Tak Berwujud	100%	-	-	DLH
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Belanja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	-	-	DLH
	10	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Belanja Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	-Laptop 3 unit -Set Komputer 13 unit	315.000.000	DLH
	11	Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Belanja Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	-	-	DLH
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			395.000.000	DLH
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Belanja Prangko, materi, benda pos & jasa pengiriman surat	100%	12 Bln	5.000.000	DLH
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Terlaksananya Pembayaran Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	100%	12 Bln	180.000.000	DLH
	03	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Belanja Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	100%	12 Bln	150.000.000	DLH
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Belanja Alat - alat kebersihan kantor & jasa tenaga kebersihan	100%	12 Bln	60.000.000	DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2022			
				Target	Rp.		
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.200.000.000		DLH
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Sopir, Biaya Pemeliharaan, Perbaikan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	12 Bln	200.000.000		DLH
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	12 Bln	200.000.000		DLH
	03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Perizinan Alat Berat	Terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Perizinan Alat Berat	100%	12 Bln	200.000.000		DLH
	04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Baiaya Pemeliharaan & Perizinan alat angkutan darat tak bermotor	Terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan , Baiaya Pemeliharaan & Perizinan alat angkutan darat tak bermotor	100%	12 bln	200.000.000		DLH
	05 Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya Baiaya Pemeliharaan Mebel	100%	12 Bln	200.000.000		DLH
	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya Biaya pemeliharaan peralatan & mesin lainnya	100%	12 Bln	200.000.000		DLH
	07 Pemeliharaan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan Aset Lainnya	100%	12 Bln	200.000.000		DLH
	08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	100%	12 Bln	200.000.000		DLH
	09 Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Biaya pemeliharaan Belanja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	12 Bln	200.000.000		DLH
	10 Pemeliharaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Biaya Belanja Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	12 Bln	200.000.000		DLH
	11 Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Biaya Belanja Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	12 Bln	200.000.000		DLH
2	11						DLH
2	11	02					DLH
		2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota	terlaksananya penyusunan dokumen DDDTLH, Dokumen RPPLH yang dilegalisasi	1 dokumen	70.000.000	DLH
		01	Penyusunan & Penetapan RPPLH Kab/Kota	dokumen DDDTLH, dokumen RPPLH dan legalisasi RPPLH	1 dokumen	70.000.000	DLH
		2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS) Kab/kota	jumlah KLHS	2 Dokumen	450.000.000	DLH
		01	Pembuatan & Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	dokumen KLHS RDTR kawasan perkotaan/ perdesaan	1 dokumen	450.000.000	DLH
		02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD	1 dokumen	-	DLH
2	11	03					DLH
		2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Laporan	640.000.000	DLH
		01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara.	Indeks kualitas tutupan lahan, indeks kualitas air, indeks kualitas udara.	IKA: 64,3 IKU : 93,68 IKTL: 52,09	490.000.000	DLH (PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN)
		02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen RAD GRK, dokumen pemantauan emisi GRK	-	150.000.000	DLH (PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN)
		2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	terlaksananya upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	100%	135.000.000	DLH
		01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	sosialisasi ke masyarakat	3 papan informasi	135.000.000	DLH BID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022			
							Target	Rp.		
			02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	indeks tutupan lahan (ITL) kabupaten tanjung jabung barat	1 buku/dokumen				DLH
			03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	terlaksananya pengelolaan kebersihan sungai	100%				DLH
			2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)		1 Dokumen	150.000.000		DLH
			05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan restorasi	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)	-	Dokumen Pemetaan dan Identifikasi areal Gambut Tanjabbar (1 Dokumen)	150.000.000		DLH
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		70%	4.760.000.000		DLH
			2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		70%	4.760.000.000		DLH
			01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Dokumen rencana pengelolaan keaneekaragaman hayati dan legalisasi		1 dokumen masterplan RTH seluruh kabupaten	400.000.000	DLH (PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH
			04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH yang dikelola	Persentase RTH yang terkelola	1 lokasi pendataan (Kec. Tungkallir) (Desa tunggal 1)	3.360.000.000		DLH
			05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati lainnya	meningkatnya sebaran wilayah (lokasi) daerah daratan dan pesisir pantai	100%				DLH
			07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah bibit/unit	Terlaksana nya penanaman (Di desa tunggal 1)	1500 bibit 1500 pancang	1.000.000.000		DLH
2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Peresentase pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) pada usaha/kegiatan		100%	90.000.000		DLH
			2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3		100%	90.000.000		DLH
			02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	3 rekomendasi yang telah dikeluarkan		100% 90.000.000	DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	DLH
2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		100%	390.000.000		DLH
			2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	390.000.000		DLH
			01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dan jumlah sosialisasi	100%	15 dokumen	110.000.000	DLH BID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	DLH
			02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas PPLH dan Fungsional PEDAL	100%	2 orang	60.000.000		DLH
			03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dunia usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup/proper	100%	21 perusahaan	120.000.000		DLH
			04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	jumlah pengawasan dan penerapan sanksi	100%	21 perusahaan	100.000.000		DLH
2	11	07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		70%	160.000.000		DLH
			2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat		2 Kecamatan	80.000.000		DLH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				2022						
				Target	Rp.					
	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	2 kecamatan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	80.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH		
	2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelembagaan MHA yang dibina		1 Kelembagaan	80.000.000		DLH		
	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelembagaan MHA yang dibina di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat		1 Kelembagaan MHA	80.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH		
2	11	08	2.01	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peresentase masyarakat kecamatan yang meningkat pengetahuan/ pemahaman terkait lingkungan hidup	70%	130.000.000		DLH	
			2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, & Penyuluhan Lingkungan Hidup, untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah sosialisasi/pelatihan		6 sekolah	130.000.000	DLH	
			01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	jumlah sosialisasi/pelatihan	2 sekolah yang telah di bina 2 sd (sd 160 merlung dan sd 5 kuala tungkal)	6 sekolah (SD/SMP) dan penilaian lintas sektor	130.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH
2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	CAKUPAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	65%	150.000.000		DLH	
			2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perolehan penghargaan kota sehat adipura/ kalpataru/sekolah adiwiyata/Dokumen IKPLHD/ SLHD		1 Dokumen	150.000.000	DLH	
			01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	perolehan penghargaan kota sehat adipura/ kalpataru/sekolah adiwiyata/Dokumen IKPLHD/ SLHD	1 dokumen	Pembinaan dan Pemantauan Titik Pantau Adipura/ 1 dokumen (IKPLHD)	150.000.000	DLH (PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN) & TATA LINGKUNGAN	DLH
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI	100%	145.000.000		DLH	
			2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		100%	145.000.000	DLH	
			01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%	100%	75.000.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah sanksi administrasi/penyelesaian sengketa dan atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	100%	10 Dunia Usaha	70.000.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	83%	22.550.000.000		DLH	
			2.01	Pengelolaan Sampah	persentase Pengelolaan Sampah	83%	22.550.000.000		DLH	
			01	Penyusunan Kebijakan & Staretegis Daerah Pengelolaan Sampah Kab/kota	Dokumen Jakstrada/legalisasi Masterplan Persampahan	Perbup Tanjung Jabung Barat No. 56 Tahun 2018	12 Bulan	110.000.000	DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	DLH
			03	penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	tonase sampah yang terangkut/petugas kebersihan/petugas TPA	16.425 Ton/M ³ /320 / 19 orang	75.000 Ton	7.500.000.000	DLH	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2022			
				Target	Rp.		
04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	jumlah sosialisasi/pelatihan 3R/bank sampah		3 kali sosialisasi	150.000.000		DLH
05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	terpenihunya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	100%				DLH
06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan yang terlegalitas	5 rekomendasi	12 bulan	80.000.000		DLH
07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah TPST3R/unit/alat berat	4 TPST3R/Dumptruck 7 unit (1 rusak berat)/ Excavator 2 unit (1 rusak ringan)/ bacholder 1 unit (rusak berat)/ Armroll 1 unit / peralatan kebersihan	-Excavator 1 unit -Mesin genset listrik 1 unit -Mesin Pemotong Rumput 2 unit -sumur bor 3 unit - peralatan kebersihan 470 unit (cangkul,skop,scrab,sapu lidi, linggis, godam) -perencanaan TPA penyangga (Pengadaan Lokasi) -countainer 3 unit - mesin penyedot air 1 unit -mesin pompa air 1 unit - pengadaan pakaian petugas kebersihan 320 unit -pengadaan sepatu petugas kebersihan -BBM kendaraan operasional kebersihan/TPA -suku cadang kendaraan operasional kebersihan/TPA -service kendaraan operasional kebersihan/TPA -Dump truck 3 unit -Viar 6 unit - gerobak sampah besi 6 unit - Tong sampah fiber 10 unit -incinerator 3 unit	14.710.000.000		DLH
					40.325.915.000		

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE
Pembina TK II / Ivb
NIP. 19680116 199703 1 002

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021- 2026.

Rancangan Rencana Kerja tahunan ini memuat program - program dan kegiatan - kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ,dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di tahun mendatang.